

# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE DI DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA

Maria Theovilla Luksi Dehot<sup>1)</sup>, Putu Nomy Yasintha<sup>2)</sup>, I Dewa Ayu Putri Wirantari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [mariatheovilla@gmail.com](mailto:mariatheovilla@gmail.com)<sup>1)</sup>, [putu\\_nomy@unud.ac.id](mailto:putu_nomy@unud.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[putriwirantari@unud.ac.id](mailto:putriwirantari@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*DKI Jakarta Provincial Education Office is an agency that implements education policies. One of the educational policies implemented is PPDB online, this policy is implemented with the aim of making it easier for students to register for the desired destination school. The government issued PERMENDIKBUD Number 17 of 2017 which regulates the zoning system on PPDB Online in Jakarta Area. The zoning system is implemented with the aim of leveling education. The purpose of this study is to find out how the effectiveness of the zoning system policy on the acceptance of new online students in Jakarta area. Then the government made a zoning system on PPDB online with the aim of leveling education. The zoning system implemented on PPDB online develops every year with several changes.*

**Keywords:** Effectiveness, PPDB Online, Zoning System, Education Policy

## 1. PENDAHULUAN

Sistem penerimaan peserta didik baru secara online telah dicanangkan sejak tahun 2009 dan hanya berlangsung di beberapa kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sistem penerimaan peserta didik baru secara online dikembangkan untuk mendukung transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Kemudian untuk wilayah ibukota, sistem tersebut dilaksanakan sejak tahun ajaran 2011/2012.

Penerimaan peserta didik secara online dilaksanakan dengan berbagai macam jalur yang umum dan mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut dilaksanakan dengan 2 jalur awal yakni melalui jalur dalam DKI dan Luar DKI.

Jalur-jalur tersebut dilaksanakan berdasarkan domisili kartu keluarga yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Pada awalnya pelaksanaan penerimaan peserta didik online tersebut hanya dilaksanakan untuk jalur umum, yakni bisa diakses oleh semua masyarakat yang berdomisili di dalam DKI Jakarta dan di Luar DKI Jakarta. Sistem tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan banyaknya pelajar yang hanya mengincar atau menginginkan salah satu sekolah saja dan menimbulkan stigma sekolah favorit sehingga membuat pelajar-pelajar lainnya hanya bersaing untuk mendaftar ke salah satu sekolah saja. Hal tersebut menjadikan penumpukan para pelajar hanya di salah satu wilayah saja, dan menjadikan sekolah-sekolah lain kurang diminati oleh pelajar-pelajar lainnya. Program pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintahan daerah

tersebut dinilai kurang efektif dan perlu adanya pembaruan-pembaruan yang lebih efektif kedepannya. Dalam menunjang pemerataan pendidikan di negara ini, pemerintah kemudian menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona atau wilayah terdekat dari tempat tinggal pelajar. Sistem tersebut dilaksanakan sejak tahun 2016 namun hanya diperuntukkan untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas saja dan belum diberlakukan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian Sistem zonasi ini dilaksanakan dengan adanya Permendikbud Tahun 2017 No. 17 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi. Sistem tersebut dilaksanakan dengan melihat prosedur-prosedur yang ada berdasarkan kondisi-kondisi di sekolah tersebut seperti daya tampung setiap sekolah, jumlah tenaga pendidik yang ada, anggaran sekolah, kriteria pelajar yang sesuai persyaratan, jumlah pelajar yang tinggal dan sebagainya (Badrudin, 2014, p.37-38). Sistem Zonasi ini dilaksanakan berdasarkan wilayah tempat tinggal yang tercantum di kartu keluarga masing-masing pelajar.

Sistem zonasi yang telah diterapkan, pada awalnya tidak banyak menarik pelajar ke sekolah-sekolah di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Seiring berjalannya waktu, sistem zonasi ini menaikkan minat peserta didik baru untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka. Pelaksanaan sistem tersebut dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah yakni

minimum sebanyak 90% dari jumlah siswa atau pelajar yang diterima di sekolah tersebut (Permendikbud No. 17 Tahun 2017). Dalam pelaksanaannya jalur zonasi tersebut dianggap terlalu sulit bagi orangtua yang kurang mengerti, namun telah dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi yang diharapkan dapat membantu para orangtua dalam mendaftarkan anak-anaknya.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem zonasi terdapat di website [ppdb.jakarta.go.id](http://ppdb.jakarta.go.id) dan mempermudah masyarakat untuk mencari tau cara-cara pelaksanaan setiap jalur yang ada. Dalam situs tersebut telah diberikan penjelasan-penjelasan mengenai setiap jalur yang terdapat dalam sistem penerimaan peserta didik baru tersebut. Pelaksanaan sistem zonasi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun memiliki ketentuan yang sama sehingga diharapkan dapat mempermudah pelajar dan orangtua dalam melakukan pemilihan sekolah. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam situs website tersebut diharapkan pelaksanaan sistem zonasi ini dapat mengurangi stigma sekolah-sekolah paling dicari bagi para pelajar, sehingga semua sekolah menjadi sekolah yang diminati tidak hanya sekolah tertentu saja.

Permasalahan-permasalahan yang masih sering ditemui yaitu diantaranya, sosialisasi yang kurang merata di kalangan masyarakat sehingga masyarakat kurang mengerti sistem tersebut, petunjuk teknis yang dinilai kurang jelas, fasilitas-fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan kurang meratanya sekolah-sekolah yang terdapat pada setiap daerah.

Permasalahan yang ada dalam penerapan sistem penerimaan peserta didik secara online melalui sistem zonasi, jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi batu sandungan bagi kelangsungan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tindakan atau cara pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sistem tersebut dan bagaimana pelaksanaan kelanjutan dari program pendidikan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka Peneliti mengambil judul **Efektivitas Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Online di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.**

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Efektivitas Kebijakan**

Suatu efektivitas kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator penentu yang dapat menilai apakah suatu program atau kebijakan yang ada efektif atau tidak. Menurut Subagyo (2000) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu, ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya; Sosialisasi Program adalah teknik penyebaran informasi yang dilakukan agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan dari suatu program kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada sasaran program; Tujuan Program merupakan pengukuran mengenai

kesesuaian antar hasil dan keinginan; Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan menurut Azizi (2016 dalam Yasintha 2021) *Effectiveness can be seen from the achievement of goals, timeliness, appropriateness of benefits, and whether the results match community expectations.* (konsep efektivitas dapat dilihat dari pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan apakah hasilnya sesuai atau tidak).

Kemudian menurut Duncan (2008 dalam Wirantari 2021) ukuran efektivitas yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator pengukuran efektivitas tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran efektivitas terdiri dari (Subagyo, 2005) ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan suatu kebijakan. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan acuan penelitian mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan apakah efektif atau tidak. Agar dijadikan evaluasi mengenai kebijakan yang telah berjalan dan akan dikaji lebih lanjut.

## **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penjelasan secara menyeluruh mengenai pembahasan, tujuan serta peran yang

dalam hal ini mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada penelitian ini metode pengumpulan data dapat menggunakan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari atau turun langsung ke dinas untuk mewawancarai sumber data serta mengumpulkan teori-teori dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang diinginkan. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis model interaktif. Analisis model interaktif merupakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Ketepatan Sasaran**

Penerimaan peserta didik baru online dilaksanakan sejak dahulu dengan tujuan untuk mempermudah para calon peserta didik agar lebih mudah dalam mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju. PPDB online dilaksanakan dengan beberapa tahapan online namun masih ada tahapan yang harus dilaksanakan di sekolah atau secara offline. Setelah pandemi, PPDB yang dilaksanakan hanya melalui online saja dan tidak perlu ke sekolah. Pada tahun 2017, kementerian mencetuskan suatu kebijakan mengenai sistem zonasi atau yang sering dikenal dengan tahapan lokal pada penerimaan peserta didik baru. Kemudian pada tahun 2019 nama tahap lokal ini berubah menjadi tahap zonasi ini.

Sasaran yang dimaksudkan ialah sudah tepat kepada objek yang dituju yaitu

para pelajar. Sasaran awal yang ditetapkan pemerintah dengan melaksanakan ppdb online dengan menggunakan beberapa tahapan yang dapat mempermudah masyarakat yaitu peserta didik dan orang tua peserta didik saat mendaftar ke sekolah yang diinginkan melalui sistem online. Pemerintah dalam hal ini juga telah melaksanakan sebuah kebijakan sistem zonasi yang ditambahkan kedalam kebijakan penerimaan peserta didik baru secara online yang telah berlangsung beberapa tahun. Kebijakan pendidikan ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Sasaran program yang dimaksud ialah pelajar yang mulai beragam di sekolah-sekolah yang tadinya hanya berisikan murid-murid atau pelajar yang lebih dominan atau tertentu saja. Seperti yang dijelaskan oleh pihak dinas bahwa terdapat perubahan mengenai keragaman pelajar yang terdapat diberbagai sekolah. Dan sebagai pelaksana, pihak sekolah juga setuju akan hal tersebut, bahwa sasaran atau tujuan awal yang diinginkan pemerintah sudah mulai tercapai karena keberagaman yang dapat dilihat dari sekolah-sekolah negeri yang ada.

Jika dilihat dari hasil temuan yang ada dapat dianalisis bahwa, perubahan sistem zonasi berubah setiap tahunnya dengan beberapa hal yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Sasaran yang diinginkan adalah pelajar yaitu agar setiap sekolah memiliki pelajar dengan nilai yang beragam, sehingga tidak hanya satu sekolah saja yang terdapat murid yang pintar. Oleh karena itu, kebijakan yang dicanangkan pemerintah merupakan

kebijakan yang bertujuan baik dan sudah tepat sasaran, dikarenakan pelajar di tiap sekolah menjadi beragam nilai, status sosial, dan aspek lainnya sehingga membuat pelajar dalam satu sekolah lebih beragam dan menghilangkan stigma sekolah favorit yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat di simpulkan bahwa tujuan awal yang diinginkan pemerintah telah tepat sasaran.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran kebijakan tersebut. Sosialisasi juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur tingkat efektifitas kebijakan sistem zonasi pada ppdb online yang tengah terlaksana. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut diantaranya yaitu pihak Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak dinas ialah sosialisasi yang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Sosialisasi yang dilaksanakan secara internal adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui aturan sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan secara eksternal adalah sosialisasi yang dilaksanakan dengan membagikan poster-poster mengenai pelaksanaan ppdb ke sekolah-sekolah dan

kelurahan setempat. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 sosialisasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara online melalui sosial media yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sedangkan sosialisasi juga dilaksanakan oleh pihak sekolah, dan dilaksanakan dengan berbagai cara yang terdiri dari tahapan internal dan eksternal. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah diantaranya yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pada murid, orangtua, guru dan pihak lainnya di lingkungan sekolah, sedangkan sosialisasi yang secara eksternal dilaksanakan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah

Proses sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak pelaksana pada awalnya masih kurang merata bagi para peserta didik yang ingin mendaftarkan diri ke sekolah tujuan yang di inginkan. Dalam pelaksanaannya PPDB online juga diketahui memiliki permasalahan pada sistem yang sering error, sehingga diperlukan beberapa perbaikan lagi kedepannya.

Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pihak dinas dan pihak sekolah mengenai sosialisasi PPDB kepada masyarakat dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh dinas dan sekolah telah banyak berdampak kepada masyarakat karena sasaran atau tujuan kebijakan telah tercapai sebelumnya. Namun, untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, masih saja ada dan berbeda setiap tahunnya sehingga

pemerintah dan sekolah sebagai pelaksana memerlukan adanya solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan kebijakan pemerintah perlu mengkaji kembali dan melakukan beberapa perubahan kembali agar mempermudah masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak dinas maupun pihak sekolah sudah baik, namun pada pelaksanaannya tetap saja terdapat permasalahan yaitu kurang meratanya proses sosialisasi yang dilaksanakan sehingga harus segera di selesaikan kembali dengan beberapa perubahan pada kebijakan yang ada.

### **Tujuan**

Tujuan di tetapkan kebijakan PPDB Online adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan anak mereka ke sekolah dalam instansi pemerintahan. Kemudian sistem zonasi pada PPDB Online juga dilaksanakan dengan tujuan untuk penyamarataan pendidikan di Indonesia.

Tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu untuk penyamarataan pendidikan. Sehingga terdapat berbagai macam pelajar yang terdapat dalam satu sekolah dan membuat pelajar lain tidak merasa diasingkan. Tujuan pelaksanaan sistem zonasi yang dijelaskan oleh pihak dinas yaitu adalah untuk pemerataan pendidikan dan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit di kalangan masyarakat. Pihak pelaksana yaitu pihak kepala sekolah menengah pertama 46

jakarta juga menjelaskan mengenai tujuan pelaksanaan sistem zonasi dari ranah pihak pelaksana yakni pihak sekolah yaitu untuk menjadikan pelajar yang terdapat dalam satu sekolah lebih beragam nilainya.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat ini, tujuan awal pemerintah untuk membentuk kebijakan ini yaitu adalah untuk penyamarataan pendidikan sudah tercapai sehingga membuat stigma yang ada dalam masyarakat perlahan menghilang. Namun, sistem zonasi yang berjalan dengan banyak perubahan yang ada masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk mengetahui outcome atau hasil yang didapat dari sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Jadi, dalam pengukuran tingkat efektivitas kebijakan, tujuan kebijakan tersebut telah tercapai namun dibutuhkan beberapa perbaikan yang akan di tinjau lagi kedepannya.

### **Pemantauan**

Pemantauan ini dilaksanakan untuk melihat dampak positif atau negatif yang ada setelah berjalannya kebijakan ini. Di Dinas pendidikan sendiri tidak terdapat permasalahan yang begitu signifikan sejak diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB online tersebut sejak tahun 2019. Sedangkan berdasarkan pihak pelaksana yaitu pihak dari sekolah, terdapat permasalahan-permasalahan yang signifikan diantaranya yaitu tidak seluruh masyarakat merasa nyaman jika pelaksanaan PPDB online terlaksana

dengan perubahan yang sangat drastis pada tahun 2020.

Proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru online yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap tahunnya memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat. Sistem zonasi yang telah dilaksanakan pada ppdb online juga telah berjalan cukup baik, dengan beberapa kekurangan yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini dikarenakan pandemi. Dengan adanya beberapa masukan mengenai PPDB Online yang berlangsung di masyarakat, pemerintah diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali mengenai sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru online agar memberikan dampak yang lebih baik lagi kedepannya. Pemantauan mengenai kebijakan ini masih terus berlangsung dikarenakan kebijakan ini masih terus berjalan setiap tahunnya dengan pola dan beberapa perubahan yang berbeda-beda setiap tahunnya.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas maka peneliiti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan sistem PPDB, dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah para calon peserta didik untuk mendaftarkan ke sekolah yang diinginkan. Kemudian dalam rangka pemerataan pendidikan, kementerian kemudian membuat peraturan mengenai penetapan sistem zonasi yang dilaksanakan sejak tahun Sistem zonasi yang dilaksanakan memiliki permasalahan saat awal pelaksanaannya, namun kemudian permasalahan yang ada tersebut dapat diatasi dengan baik. Penerimaan

peserta didik baru secara online memiliki aturan yang berubah setiap tahunnya.

Dari hal tersebut maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik online di wilayah Jakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, berdasarkan 4 indikator yaitu jika dilihat berdasarkan indikator ketepatan sasaran, dapat di simpulkan bahwa telah tepat sasaran dikarenakan pelajar yang mulai beragam di sekolah. Kemudian berdasarkan indikator sosialisasi, maka dapat di simpulkan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik namun kurang merata di berbagai pihak. Kemudian, PPDB telah berjalan sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan oleh pemerintah. Berdasarkan pada segi pemantauan, PPDB yang dilaksanakan setiap tahunnya sudah berjalan dengan baik, namun dikarenakan terjadi perubahan sistem setiap tahunnya tetap ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Dan di tahun 2020 permasalahan tersebut menjadikan sistem PPDB yang berjalan dinilai kurang efektif dikarenakan kebijakan yang berubah sangat banyak. Namun pemerintah tetap dapat melakukan perubahan pada sistem PPDB online yang akan terus berjalan setiap tahunnya.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal/Dokumen/Karya Ilmiah**

Subagyo, Ahmad. 2000. *Tesis Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

- Mira, Nur. 2016. *Jurnal Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar*. Makassar : Universitas Hasanuddin
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Sistem Zonasi : Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Kemendikbud Jakarta
- Sari, N.P.M., Sukadi, B.D.N.R., & Yasintha, P.N. 2021. *The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali*. Universitas Udayana.
- Dewi, D.A.N., Wijaya, K.A.S., & Wirantari, I.D.A.P. 2018. *Efektivitas Manajeme Parkir Dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Di Kelurahan Ubud*. Universitas Udayana